

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini berisikan kajian teoritis mengenai ruang lingkup topik penelitian yang akan diteliti. Topik tersebut berisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kinerja UMKM. Berisi penjelasan pengertian dan indikator variabel penelitian yang akan dikaji secara mendalam.

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku dan jurnal untuk mendapatkan informasi yang terdapat sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

##### **2.1.1 Literasi Keuangan**

Literasi keuangan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola keuangannya baik keuangan pribadi maupun usahanya untuk meningkatkan keseimbangan keuangannya.

##### **2.1.1.1 Pengertian Literasi Keuangan**

Literasi keuangan merupakan kemampuan dalam mengelola uang menganalisis, membaca, dan komunikasi tentang pengalokasian pada sumber daya keuangan guna mencapai tingkat kesejahteraan dan pengambilan keputusan ekonomi secara tepat Vitt, et al Dalam (shaari, et al, 2013: 280). Menurut Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Literasi keuangan adalah sebagai kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang (Chen & Volpe, 1998). Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchaell, 2017). Definisi literasi keuangan menurut Mason & Wilson (Krisna,2010) adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya.

Dari pernyataan pengertian literasi keuangan menurut beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan dan juga pemahaman yang dimiliki seseorang dalam membuat keputusan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat serta berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengaplikasikan manajemen keuangan pribadi seperti merencanakan pengendalian keuangan. Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2013), Literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik”.

Literasi keuangan terjadi apabila seorang individu memiliki keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

### **2.1.1.2 Prinsip Dasar Literasi Keuangan**

Pada prinsip dasar literasi keuangan yang terdapat dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) antara lain:

1. Terencana dan terukur

Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan dengan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran atau pun kebijakan otoritas dan kebijakan perilaku memiliki indikator yang memperoleh informasi dalam peningkatan literasi keuangan.

2. Berorientasi pada pencapaian

Dilakukan hingga mampu mencapai tujuan dalam peningkatan literasi keuangan dengan secara optimal dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

3. Berkelanjutan

Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan juga memiliki aspek jangka panjang pelaku usaha jasa keuangan tentunya perlu mengutamakan pengelolaan lembaga juga produk layanan jasa keuangan.

4. Kolaborasi

Melibatkan seluruh pelaku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

### **2.1.1.3 Tujuan Literasi Keuangan**

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen juga Masyarakat, tujuan dari literasi keuangan diantaranya meliputi:

1. Peningkatan kualitas juga pengambilan keputusan keuangan individu.
2. Perubahan pada sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, agar mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

### **2.1.1.4 Manfaat Literasi Keuangan**

Manfaat literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) antara lain:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;
3. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

### **2.1.1.5 Klasifikasi dan Tingkat Literasi Keuangan**

Untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan survey mengenai tingkatan dari literasi keuangan. Berdasarkan survey tersebut menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia terdapat 4 Tingkat diantaranya sebagai berikut :

1. *Well literate* (21,84%)

Yaitu tingkat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk jasa keuangan, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. *Sufficient literate* (75,69%)

Yaitu tingkat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa keuangan.

3. *Less literate* (2,06%)

Tingkat ini hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. *Not literate* (0,41%)

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dari hasil survey yang dilakukan otoritas jasa keuangan (OJK) pada tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan yang paling tinggi di Indonesia yaitu pada tingkat Sufficient Literate. Sebanyak hampir 76% penduduk Indonesia memiliki tingkat pengetahuan mengenai produk keuangan akan tetapi faktanya mereka tidak bisa mempraktikkan apa yang mereka ketahui pada pengelolaan keuangannya.

Adanya ke-empat klasifikasi atau tingkat literasi keuangan tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi yang tinggi sehingga mereka dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan yang dianggap paling tepat untuk kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

#### **2.1.1.6 Indikator Literasi Keuangan**

Adapun Indikator Literasi Keuangan diantaranya adalah (Mendari & Kewal, 2013):

1. Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan

Meliputi pemahaman akan beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.

2. Tabungan

Merupakan bagian yang meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan Tabungan seperti penggunaan kartu kredit.

3. Asuransi

Merupakan bagian yang meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.

4. Investasi

Bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

#### **2.1.1.7 Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), yaitu:

1. Jenis kelamin;
2. Tingkat pendidikan;
3. Tingkat pendapatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan yaitu: 1) Status social ekonomi orang tua 2) Pendidikan pengelolaan keuangan keluarga 3) Pembelajaran keuangan di perguruan tinggi negeri (Widayati, 2011).

### **2.1.2 Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan akan solusi keuangan misalnya mengenai pembiayaan modal kerja dan lainnya.

#### **2.1.2.1 Pengertian Inklusi Keuangan**

Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No.76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan yaitu akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk maupun layanan keuangan. Layanan ini memegang peranan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan berkelanjutan (World Bank, 2016).

Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan (Gerdeva & Rhyne, 2011:6). Sementara itu, menurut Wahid (2014:54) Inklusi Keuangan merupakan rencana

pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai proses memastikan akses ke produk dan layanan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan oleh pelaku kelembagaan (*Reserve Bank of India*, 2016:1).

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah kemampuan menggunakan layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk, jasa maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, cepat, nyaman dan aman oleh seluruh masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonominya.

#### **2.1.2.2 Prinsip Dasar Inklusi Keuangan**

Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat di dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) antara lain:

1. Terukur

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan mempertimbangkan keterjangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan layanan jasa keuangan sehingga akses, produk dan layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

## 2. Terjangkau

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

## 3. Tepat Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat yang menjadi sasaran.

## 4. Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang.

### **2.1.2.3 Tujuan Inklusi Keuangan**

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari inklusi keuangan meliputi :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.
2. Meningkatkan penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh PUJK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
3. Meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

#### **2.1.2.4 Manfaat Inklusi Keuangan**

Ada berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat menjadi unbanked, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (permintaan masyarakat), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *design product barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai) (Bank Indonesia, 2011).

Inklusi keuangan mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi;
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan;
3. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*;
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan;
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan;
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia;
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan;
8. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas lowincome trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

### **2.1.2.5 Pilar Strategi Nasional Inklusi Keuangan**

Dalam pengembangan inklusi keuangan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi. PerPres ini akan menjadi pedoman langkah-langkah kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antar daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. 6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif antara lain:

#### **1. Edukasi Keuangan**

Strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Ruang lingkup pilar ini meliputi:

- a. Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan.
- b. Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan.
- c. Perlindungan nasabah
- d. Keterampilan mengelola keuangan.

#### **2. Fasilitas Keuangan**

Publik Strategi pilar ini adalah mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi:

- a. Subsidi dan bantuan sosial.

- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemberdayaan UMKM.

### 3. Pemetaan Informasi

Keuangan Tujuan pilar strategi pemetaan informasi keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan dipilar ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis).
- b. Sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait).
- c. Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana.
- d. Identifikasi nasabah potensial.

### 4. Kebijakan atau Peraturan yang Mendukung

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah atau Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif regulasi untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi:

- a. Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Menyusun skema produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Mendorong perubahan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional;

- d. Menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan;
- e. Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan;
- f. Menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

#### 5. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Pilar ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang berpotensi di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi :

- a. Fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan tidak layak) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris;
- b. Meningkatkan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha;
- c. Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

#### 6. Perlindungan Konsumen

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam bertransaksi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen pada pilar ini meliputi:

- a. Transparansi produk;
- b. Penanganan keluhan nasabah;
- c. Mediasi;
- d. Edukasi konsumen.

#### **2.1.2.6 Indikator Inklusi Keuangan**

Akses keuangan dan kesejahteraan merupakan indikator yang paling banyak dilakukan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan (Sanistasya, Yanti dan Bongomin, 2017). Pemahaman tentang produk dan layanan jasa keuangan membuat masyarakat semakin percaya menggunakan produk dan jasa keuangan secara efektif. Semakin mudah akses keuangan dan merasa terlindungnya bertransaksi di lembaga keuangan serta ditunjang dengan sikap literate yang dimiliki individu, akan membuat individu tersebut menggunakan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 (Perpres SNKI, 2020:12) indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi berikut:

1. Jangkauan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya;
2. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan;
3. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **2.1.3 Kinerja UMKM**

Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuannya.

#### **2.1.3.1 Pengertian Kinerja UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriterianya usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 2017:9).

Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang di capai oleh seorang individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut didalam UMKM pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standard dari UMKM yang individu bekerja (Aribawa, 2016:2).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai secara keseluruhan dari hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama pada sebuah identitas usaha dengan kriteria aset dan omzet yang telah ditentukan dalam undang-undang.

#### **2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja UMKM**

Menurut Minuzu (Suci, 2019:13) terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal terdiri dari:

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang *adaptif* dan *transformative*. Sumber daya wirausaha berkaitan dengan manajemen sebagai pemicu proses produksi, pengusaha perlu memiliki kemampuan yang dapat di andalkan untuk mengatur dan mengkombinasikan tenaga kerja dan tugasnya yang tepat, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan.

b. Aspek Keuangan

Aspek keuangan, proses institusi pasar dan instrument yang terlibat dalam perpindahan atau transfer uang antar individu bisnis dan pemerintah. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

c. Aspek Teknis Dan Operasional

Aspek ini juga dikenal sebagai aspek produksi, yaitu rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Jadi, analisis aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout serta alat-alat yang digunakan.

d. Aspek Pemasaran

Aspek Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan dan mengkomunikasikan, serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan UMKM. Pemasaran meliputi segmentasi, target pasar, dan posisi pasar. Segmentasi pasar adalah proses dimana sebuah produk membagi pasar yang *homogeny* menjadi *heterogen* berdasarkan kebutuhan, keinginan dan ciri-ciri konsumen (geografis seperti perkotaan dan pedesaan).

2. Faktor eksternal terdiri dari:

a. Aspek kebijakan pemerintah

Aspek Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau Negara kepada seluruh

anggota masyarakat untuk memecahkan yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

b. Aspek Sosial Budaya Dan Ekonomi

Aspek non fisik ini baik secara langsung maupun tidak langsung selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik didalam kehidupan internal sehari-hari maupun eksternalnya. Dalam kehidupan internal masyarakat, aspek non fisik ini berkaitan dengan perilaku masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari yang tentunya berdampak pada pola ruang yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.

### 2.1.3.3 Indikator Kinerja UMKM

Menurut Ali (2003) dalam Dewi (2019) mengemukakan bahwa kinerja UMKM dianalisis menggunakan pendekatan berdasarkan tiga asumsi berikut:

1. Pengukuran kinerja UMKM kerap sulit dilakukan secara kuantitatif, dikarenakan terbatasnya sumber daya (pemahaman keuangan dan tenaga kerja).
2. Pengukuran kinerja pada umumnya melihat indikator keuangan yang kompleks, sehingga hal ini tidak secara lengkap memperlihatkan kondisi aktual yang terjadi di bisnis tersebut.
3. Pengukuran kinerja yang kerap dipakai relatif hanya sesuai bila digunakan untuk perusahaan besar yang terstruktur dalam manajemen perusahaannya.

Indikator pengukuran kinerja dapat menggunakan *balanced scorecard*. *Balanced scorecard* ialah alat ukur sistem kinerja dari dua sisi yaitu sisi keuangan dan sisi non keuangan. *Balanced Scorecard* terdapat empat fokus *perspektif*,

perspektif tersebut dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan sebelumnya dan sekarang. Sehingga dengan menggunakan metode *balanced scorecard* dalam mengukur kinerja perusahaan akan lebih efektif karena diukur dari dua sisi yaitu sisi keuangan dan non keuangan (Robert & David, 1992). Adapun ke-empat perspektif tersebut, yaitu:

1. Perspektif keuangan (*financial perspective*)
2. Perspektif pelanggan (*customer perspective*)
3. Perspektif proses bisnis internal (*Internal Business processes perspective*)
4. Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*)

#### **2.1.3.4 Klasifikasi UMKM**

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang Undang No 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

#### **2.1.3.5 Karakteristik UMKM**

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun pelaku usaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang).
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang).
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan 300 orang).

Dalam persektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama.
4. *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

#### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Suardana dan musmini (2020)  Pengaruh literasi keuangan, akses pemodal, dan minat menggunakan E-commerce terhadap kinerja keuangan UMKM	Literasi Keuangan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM akses permodalan berpengaruh positif kinerja UMKM minat menggunakan E-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM	Variabel independen yang memiliki persamaan yaitu Literasi Keuangan variabel dependen yaitu Kinerja UMKM	Variabel Independen yang memiliki perbedaan yaitu Inklusi Keuangan	Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi vol. 11 No.2 ISSN:2614-1930
2.	Husnul, Akhiar (2021)  Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi	Variabel inklusi keuangan memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM, literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM	Sama sama meneliti tentang Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada pengumpulan data yang terdapat pada	Jurnal Bisnis, Vol. 1, No. 1 Maret 2021, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				penelitian terdahulu, peneliti menggunakan <i>convenience sampling</i>	
3.	Nur, Indriyati (2020)  Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm batik di kabupaten tegal	Inklusi keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal	Variabel independen yang memiliki persamaan yaitu Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Variabel dependen juga memiliki persamaan yaitu Kinerja UMKM.	Perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian yang akan saya lakukan terdapat di Kabupaten Tasikmalaya,	Jurnal Ekonomi, Vol. 1, No. 2. Universitas Pancasakti Tegal
4.	Quintiliani, Andrea, Modina, Michele, Arnone, Massimo (2023)  <i>Financial literacy, value creation and firm performance: an investigation</i>	<i>The results suggest a positive and significant relationship between financial literacy and the variables that drive the value creation. Greater financial literacy allows SMEs to</i>	Variabel independent memiliki persamaan yaitu literasi keuangan, dan variable dependen memiliki persamaan yaitu UMKM	Variabel independent memiliki perbedaan yaitu inklusi keuangan. Dan objek penelitian terdapat perbedaan yaitu UMKM Sektor Pertanian di Kabupaten	<i>International Journal of Entrepreneurship and Small Business</i> Volume 49, Issue 1, Pages 63 – 86. ISSN: 14761297

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>of Italian small and medium enterprises</i>	<i>optimise their capital structure and select the most profitable projects.</i>		Tasikmalaya	
5.	Yanti (2019) Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM dan Literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM	Variabel independent memiliki persamaan yaitu <i>Financial Literacy</i> dan <i>Financial Inclusion</i> , serta Variabel Dependen Kinerja UMKM	Objek pana penelitian ini yaitu UMKM di Kecamatan Moyo Utara, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek nya yaitu UMKM sektor pertanian di Kabupaten Tasikknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu <i>probability sampling</i> , sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan Teknik <i>non-probability sampling</i> .	Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.2 No.12019 Publisher Jurnal Universitas Teknologi Sumbawa
6.	Milzam, Kasfy Nasution (2019)		Variabel independen memiliki persamaan		Jurnal Bisnis, Vol 1, No 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analisis pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM (studi Kasus Pedagang Di Kecamatan Medan Johor	Hasil penelitian ini menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM	yaitu Inklusi Keuangan	Varibel independen pada penelitian yang akan dilakukan terdapat 2, yaitu Literasi Keuangan. Dan Variabel dependen yaitu Kinerja keuangan UMKM	
7.	Kasendah, wijayangka (2019)  Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM	Variabel independen yang memiliki persamaan yaitu Literasi Keuangan, variabel dependen yaitu Kinerja UMKM	Variabel independen yang memiliki perbedaan yaitu Inklusi Keuangan	Jurnal manajemen dan bisnis vol.3 No.1 ISSN : 2579-4892
8.	Sisilia & Wayan (2022)  Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha, inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.	Variabel independent memiliki persamaan yaitu Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Variabel dependen yaitu Kinerja UMKM	Objek pada penelitian ini yaitu usaha mikro di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan yaitu	Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 4 No. 3, Desember 2022 P-ISSN: 2685-5526

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan, inklusi keuangan mampu memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha		UMKM. Sektor Pertanian Di Kabupaten Tasikmalaya. a. Penelitian ini menggunakan Teknik Same, sedangkan penelitian yg akan dilakukan menggunakan regresi berganda	
9.	Mei Ruli Ninin (2021)  Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah	Inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Sedangkan literasi keuangan memiliki pengaruh yang terhadap kinerja UMKM	Sama sama meneliti seputaran Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja umkm.	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian, menggunakan alat analisis partial ls, peneliti menggunakan non-probability sampling yaitu <i>convenience sampling</i>	Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen P-ISSN: 2303-2065 E-ISSN: 2502-5430 Vol 10 No 1
10	Winarto (2020)	Hasil analisisnya secara parsial		Variabel independen	Jurnal siasat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengaruh <i>Knowledge management</i> terhadap Peningkatan Kinerja Umkm Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderasi	<i>knowledge implementing, knowledge creating, and knowledge sharing</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Secara simultan, <i>knowledge management</i> juga memiliki pengaruh positif terhadap UMKM.	Variabel dependen yang memiliki persamaan yaitu Kinerja UMKM	yang memiliki perbedaan yaitu Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan	bisnis Vol.20 No.1 ISSN : 0353-7665	

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Saat ini terdapat 35.212 pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami gagal usaha. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah umkm yang mengalami kegagalan usaha setiap tahunnya. Salah satu penyebab nya adalah kurangnya kemampuan para pelaku usaha menjalankan UMKM sesuai rencana dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terlihat bahwa diketahui peningkatan kegagalan usaha tersebut terjadi karena kinerja yang buruk. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM yaitu dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap Literasi Keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Diperlukan cara strategis guna meningkatkan kinerja salah satunya adalah dengan literasi keuangan (Aribawa, 2016). Literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan. Dengan definisi tersebut diharapkan pelaku usaha jasa keuangan, konsumen produk maupun masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami jasa keuangan tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan penelitian Suardana (2020) dan Kasendah (2019) menyatakan bahwa Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Pengetahuan keuangan ini penting bagi para pelaku UMKM karena dapat mengurangi risiko bangkrut dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Nur, 2020).

Selain itu, UMKM masih sulit dalam mengembangkan usaha mereka karena kesulitan modal. Untuk mengatasi masalah permodalan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan inklusi keuangan (Yanti, 2019). Sesuai dengan rujukan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yaitu Inklusi Keuangan (Bire, Sauw dan Maria, 2019). Inklusi keuangan yaitu akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk maupun layanan keuangan. Layanan ini memegang peranan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan berkelanjutan (Sisilia & Wayan, 2022). Didukung oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh Milzam & Kasfy (2019) penelitian

tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan merupakan dua faktor yang terbukti dapat meningkatkan kinerja UMKM. Semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, maka akan semakin tinggi pula kesadaran para pelaku UMKM mengenai pengetahuan keuangan dan produk keuangan yang dapat meningkatkan kinerja UMKM tersebut (Husnul, 2021). Pemahaman dan melek keuangan sangat dibutuhkan dalam dunia usaha. Begitu juga dengan pemahaman terhadap produk-produk keuangan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM/usaha mikro kecil menengah dalam menjalankan dunia bisnisnya (Winarto, 2020).

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono, 2013:132). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H<sub>1</sub> Literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya.

H<sub>2</sub> Inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya.